

# PETA PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI INDONESIA

M. Soekarni, Agus Syarip Hidayat, dan Joko Suryanto<sup>1</sup>

## Abstract

The aim of this paper is to describe the spread of Foreign Direct Investment (FDI) and domestic investment according to its location, sector, and labour absorption. Analysis is based on secondary data published by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). There are three main findings in this study: First, this study found that in the period 2002-2008, the largest part of FDI and domestic investment concentrated in Java and Sumatra Island. Meanwhile, the provinces in the east of Indonesia received a small part of either FDI or domestic investment. This uneven investment concentration occurred because in the eye of investors, Java and Sumatra is more attractive than other Islands in Indonesia in term of better infrastructure, wider potential market and higher quality of human resources. Second, the majority of foreign and domestic investors selected secondary sector (manufacturing) for their investment. Interestingly, there was a trend that those investments shifted from secondary sector to tertiary sector. Third, labour absorption both in FDI and domestic investment, particularly invested in the secondary sector tend to increase. However, there is a tendency that investment in secondary and tertiary sectors moved to less labour intensive industries.

## PENDAHULUAN

Investasi atau penanaman modal sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana telah ditegaskan dalam UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal meliputi: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (b) menciptakan lapangan pekerjaan; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (e) meningkatkan kapasitas kemampuan teknologi nasional; (f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan (h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber pertumbuhan ekonomi memang bukan hanya investasi, melainkan juga konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor. Akan tetapi, pengaruh investasi lebih besar dan lebih kuat terhadap perkembangan ekonomi dibandingkan sumber pertumbuhan yang lain. Sebagaimana ditulis Basri (2009: 14), kalau investasi dikatakan sebagai “makanan paling bergizi”, maka tentunya sumber-sumber pertumbuhan lain tidaklah sebaik investasi. Selama ini konsumsi meningkat dan kian kuat

pengaruhnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi, demikian pula dengan belanja pemerintah. Tetapi, karena konsumsi dan belanja pemerintah (di luar belanja investasi) tidak berhubungan langsung dengan *output* atau produksi, maka pertumbuhan ekonomi yang dibuatkannya juga tidak mencerminkan kenaikan kapasitas atau produksi riil dari ekonomi yang bersangkutan. Di samping itu, guna memungkinkan kedua hal itu terus berlangsung secara berkesinambungan, maka tentunya harus ada pemasukan lebih besar dari selisih ekspor dan impor. Agar dapat menghasilkan devisa secara cepat, maka ekspor komoditas primer alias bahan mentahlah yang mencuat, yang acap kali dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

Secara umum, kontribusi investasi hanya sekitar 20 persen atau kurang terhadap total *output* domestik Indonesia. Selama masa krisis, perekonomian lebih banyak didorong oleh pengeluaran konsumen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pengeluaran konsumen mungkin tidak berkelanjutan. Untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar untuk sektor *tradable*

<sup>1</sup> Ketiga penulis adalah peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI)

seperti pertanian, pertambangan dan khususnya industri pengolahan (manufaktur). Dalam kaitannya dengan kebutuhan peningkatan investasi, Indonesia perlu melakukan penyesuaian untuk menciptakan iklim investasi domestik yang lebih kondusif dan peningkatan daya saing global. Indonesia menempati peringkat yang sangat rendah, yaitu 129 dari 181 negara berdasarkan indikator “*Ease of Doing Business 2009*” yang diterbitkan Bank Dunia. Peringkat tersebut berada di bawah Vietnam, Thailand, Cina, dan India. Selain itu, menurut IMD’s “*World Competitiveness Yearbook 2008*”, Indonesia menempati peringkat 51 dari 55 negara, di bawah Filipina, Cina dan India. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa iklim bisnis di Indonesia bagi investasi swasta adalah salah satu dari yang kurang diminati di dunia (Negara, Firdausy, and Adam 2009).

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya ketimpangan yang cukup besar dalam penyebaran kegiatan penanaman modal, baik PMA maupun PMDN antardaerah di Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan penyebaran PMA dan PMDN tahun 2009, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari nilai realisasi PMA sebesar US\$ 10,8 miliar, hampir 86% terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta (51%), Jawa Barat (17,9%), Banten (13,1%), dan Jawa Timur (3,9%). Demikian pula halnya dengan penyebaran PMDN, meskipun relatif lebih merata dibandingkan dengan penyebaran PMA, namun porsi yang mengalir ke Pulau Jawa juga masih sangat dominan. Dari nilai realisasi PMDN Rp37,8 triliun, 61% di antaranya memilih lokasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Sementara itu, PMDN yang masuk ke Sumatra mencapai 20,8%. Ketimpangan seperti ini tentunya tidak sehat bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Sebagaimana dijelaskan oleh teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, investasi mempunyai korelasi positif dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, jika investasi di suatu daerah tidak berkembang, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut kemungkinan besar akan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang lebih mampu menarik investor. Pada gilirannya tingkat pendapatan per kapita di daerah yang bersangkutan menjadi lebih kecil dan peluang kerja juga relatif terbatas. Oleh karena itu, pemerintah dan *stakeholders* yang lain perlu memahami secara utuh peta penyebaran PMA dan PMDN, mengkaji faktor-faktor penyebabnya,

dan merumuskan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Beranjak dari uraian diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran dan perkembangan PMA dan PMDN di Indonesia selama kurun waktu 2002-2008. Secara lebih spesifik, ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu: (a) memetakan perkembangan dan penyebaran PMA dan PMDN menurut sektor ekonomi dan provinsi; (b) mengkaji peranan PMA dan PMDN dalam menciptakan kesempatan kerja.

## METODOLOGI

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*desk research*). Sebagian besar analisis berdasarkan pada data sekunder yang dipublikasikan BKPM. Sektor ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Sektor primer, meliputi kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan usaha tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan; (2) Sektor sekunder, mencakup kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan industri dan pengolahan di antaranya yaitu industri makanan; tekstil; kulit; kayu; kertas; kimia dan farmasi; karet dan plastik; Mineral Non Logam; Logam; Mesin dan Elektronik; dan (3) Sektor tersier, terdiri dari kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan jasa, seperti penyediaan listrik, gas dan air; jasa konstruksi; perdagangan dan reparasi; hotel dan restoran; transportasi, gudang dan telekomunikasi; perumahan, kawasan industri dan, perkantoran; pariwisata dan hiburan. Selanjutnya, penanaman modal tersebut dibedakan pula menurut nilai yang terealisasi dan porsi nilai realisasi terhadap nilai yang disetujui.

## ANALISIS PETA PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

### Peta PMA Menurut Lokasi

Dalam periode 2002–2009, perkembangan jumlah Izin Usaha Tetap (IUT) dan investasi PMA mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Pada tahun 2002 jumlah IUT sebanyak 443 dengan nilai investasi sekitar US\$ 3 miliar. Tujuh tahun kemudian atau tepatnya tahun 2009, jumlah IUT mengalami lonjakan hampir tiga kali lipat menjadi 1.221, sementara nilai investasi pada periode yang sama

**Tabel 1.** Izin Usaha Tetap (IUT) dan Nilai Investasi PMA, Tahun 2002–2009

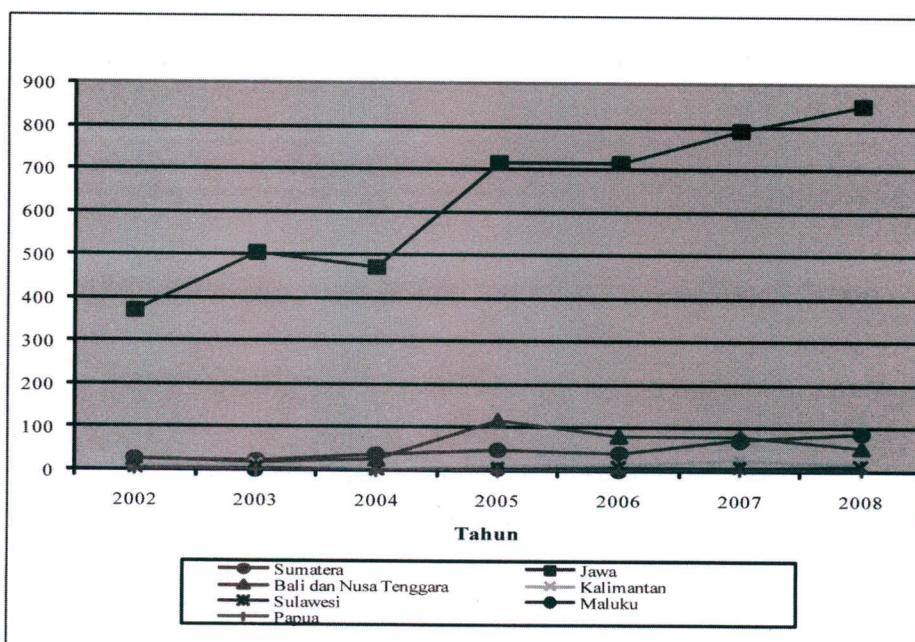
Tahun	IUT		Investasi	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah (US\$ 000)	Pertumbuhan (%)
2002	443		3.086.663	
2003	570	28,7	5.445.260	76,4
2004	548	-3,9	4.572.698	-16,0
2005	907	65,5	8.911.002	94,9
2006	869	-4,2	5.991.679	-32,8
2007	982	13,0	10.340.437	72,6
2008	1138	15,9	14.871.400	43,8
2009	1221	7,3	10.815.200	-27,3

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

juga mengalami peningkatan hingga mencapai US\$ 10,8 miliar. Tingkat fluktuasi PMA dalam periode ini lebih banyak terjadi pada jumlah investasinya, sementara jumlah IUT-nya menunjukkan tren peningkatan.

Berdasarkan data IUT PMA, Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling banyak diminati perusahaan asing dalam periode 2002–2008. Pada tahun 2002, persetujuan investasi asing berdasarkan jumlah IUT yang dikeluarkan BKPM di wilayah Pulau Jawa mencapai 371 perusahaan. Angka ini kemudian melonjak menjadi 851 perusahaan pada tahun 2008. Konsentrasi PMA di Pulau Jawa

terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara untuk wilayah luar Pulau Jawa, PMA tersebar di Pulau Sumatra, Bali dan Nusa Tenggara. Di wilayah Pulau Sumatra, PMA lebih banyak terkonsentrasi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatra Utara. Gambaran sebaran jumlah IUT PMA menurut pulau lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Grafik 1 berikut ini.



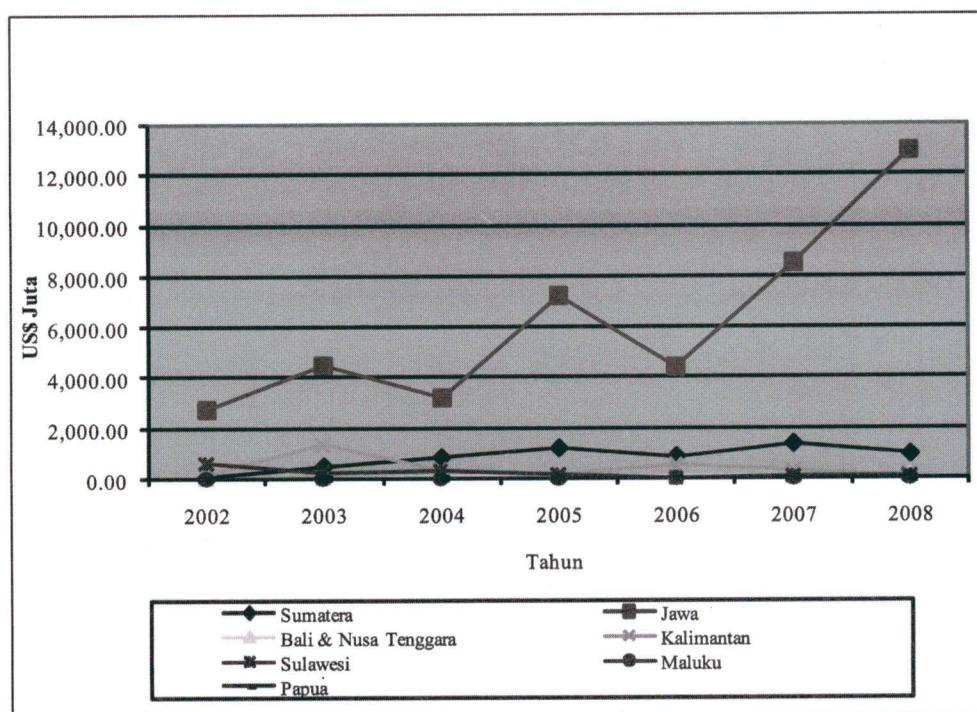
Sumber : BKPM (diolah)

**Grafik 1.** Perkembangan Izin Usaha Tetap (IUT) PMA menurut pulau, periode 2002–2008

Peta penyebaran PMA berdasarkan besarnya nilai realisasi investasi juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2002, investasi asing yang ditanam di wilayah Pulau Jawa sebesar US\$ 2,7 juta (88,6% dari total PMA di seluruh Indonesia). Besarnya nilai PMA untuk pulau lain secara berturut-turut pada tahun 2002 adalah Kalimantan sebesar US\$ 188.600 (6,11%), Sumatra sebesar US\$ 91.200 (2,96%) dan Sulawesi sebesar US\$ 60.400 (1,91%). Sementara itu, nilai PMA untuk wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara, pulau Maluku dan pulau Papua dan Irian Jaya relatif kecil yaitu di bawah 1% (Lihat Grafik 2). Enam tahun kemudian atau tepatnya di tahun 2008, nilai penanaman modal di Pulau Jawa tumbuh semakin cepat yaitu mencapai US\$ 12,9 juta atau setara dengan 91,2% dari seluruh investasi yang ada di Indonesia. Peningkatan PMA juga terjadi di Sumatra dan Sulawesi pada tahun yang sama. Nilai realisasi PMA di Sumatra mencapai US\$ 982.300 sehingga pangannya dalam PMA nasional juga meningkat menjadi 6,91%. Adapun nilai PMA di Sulawesi meningkat tipis menjadi US\$ 65.400 dollar, namun pangannya menurun menjadi 0,46 persen. Sebaliknya, nilai PMA di Kalimantan justru mengalami penurunan menjadi US\$ 112.600 dan pangannya juga menurun tajam menjadi 0,79% pada tahun 2008.

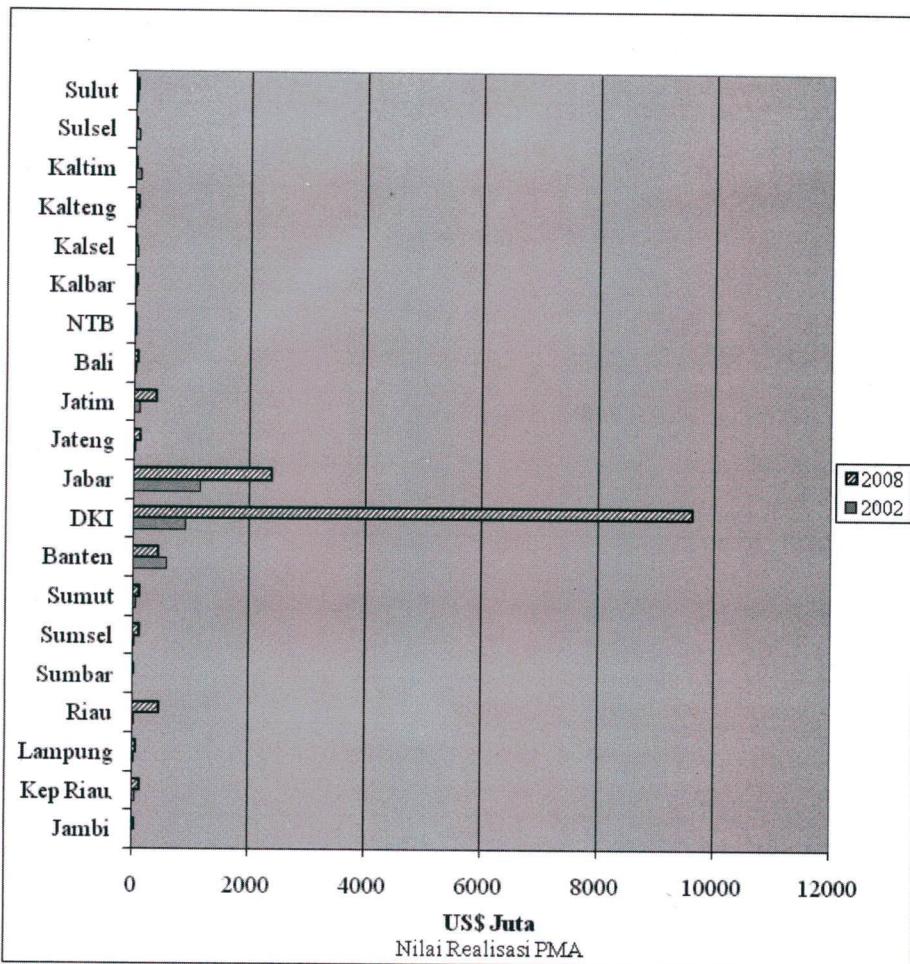
Data di atas menunjukkan dengan jelas bahwa persebaran PMA menurut wilayah pulau belum merata dan bahkan sangat timpang karena sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan Pulau Jawa masih menjadi pilihan utama para investor asing dalam menanamkan modalnya, yaitu: (a) ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai; (b) potensi pasar yang lebih besar; (c) ketersediaan tenaga kerja terampil lebih mencukupi; (d) ketersediaan industri pendukung dan industri terkait (*supporting and related industries*).

Apabila peta perkembangan PMA berdasarkan nilai realisasi investasi menurut pulau sebagaimana diuraikan di atas dirinci lagi menurut provinsi, maka didapatkan beberapa provinsi saja yang mampu menarik PMA dalam jumlah yang cukup besar. Pada Grafik 3 di bawah ini dapat dilihat dengan jelas penyebaran PMA di Pulau Jawa juga menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Nilai realisasi PMA lebih banyak terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.



Sumber : BKPM (diolah)

Grafik 2. Perkembangan nilai realisasi PMA menurut pulau, periode 2002–2008



Sumber : BKPM (diolah)

**Grafik 3.** Peta realisasi PMA menurut provinsi tahun 2002–2008

Satu hal lagi yang menarik untuk dikaji dari Grafik 3 di atas adalah terjadinya pergeseran nilai realisasi PMA terbesar dari Jawa Barat ke DKI Jakarta. Pada tahun 2002, nilai realisasi PMA di DKI Jakarta baru mencapai US\$ 906 juta, sedangkan di Jawa Barat sudah mencapai US\$ 1,1 miliar. Namun, enam tahun kemudian, nilai realisasi PMA di DKI mengalami lonjakan yang sangat tinggi menjadi US\$ 9,6 miliar dan di Jawa Barat hanya mampu tumbuh menjadi sekitar US\$ 2,4 miliar. Pertumbuhan PMA yang sangat cepat di DKI Jakarta ini berasal dari investasi di sektor jasa, khususnya dalam bidang usaha jasa telekomunikasi.

### Peta PMA Menurut Sektor Usaha

Secara sektoral, penyumbang terbesar PMA pada tahun 2002 adalah sektor sekunder yang menyerap PMA sebesar US\$ 1,54 miliar (50%). Sementara itu, PMA di sektor tersier baru mencapai US\$ 1,44 miliar (46,8%) dan sektor primer hanya senilai US\$ 97,7 juta (3,2% dari total PMA). Dalam perkembangannya, kontributor utama PMA ini silih berganti antara sektor sekunder dengan sektor tersier, hingga akhirnya sejak tahun 2007 sektor tersier secara konsisten menjadi sektor yang paling banyak menarik PMA. Pada tahun 2008 bahkan share sektor tersier dalam total nilai investasi PMA sudah mencapai 69,4%.

**Tabel 2.** IUT dan Nilai Investasi PMA Berdasarkan Sektor Tahun 2002-2009

Tahun	Sektor Primer		Sektor Sekunder		Sektor Tersier		Jumlah	
	IUT	Investasi (US\$. 000)	IUT	Investasi (US\$. 000)	IUT	Investasi (US\$. 000)	IUT	Investasi (US\$. 000)
2002	14	97.667	232	1.543.646	197	1.445.350	443	3.086.663
2003	23	253.316	280	1.875.858	267	3.316.086	570	5.445.260
2004	22	308.114	250	2.804.795	276	1.459.789	548	4.572.698
2005	44	402.314	335	3.500.625	528	5.008.063	907	8.911.002
2006	39	532.441	363	3.619.683	467	1.839.555	869	5.991.679
2007	62	598.320	390	4.696.984	530	5.045.133	982	10.340.437
2008	55	335.600	495	4.515.200	588	10.020.500	1.138	14.871.400
2009	49	462.600	474	3.831.100	698	6.521.200	1.221	10.815.000

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

**Tabel 3.** Porsi IUT dan Investasi PMA di Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2002–2009

Tahun	Sektor Primer		Sektor Sekunder		Sektor Tersier		Jumlah	
	IUT	Investasi	IUT	Investasi	IUT	Investasi	IUT	Investasi
	%	%	%	%	%	%	%	%
2002	3,2	3,2	52,4	50,0	44,5	46,8	100	100
2003	4,0	4,7	49,1	34,4	46,8	60,9	100	100
2004	4,0	6,7	45,6	61,3	50,4	31,9	100	100
2005	4,9	4,5	36,9	39,3	58,2	56,2	100	100
2006	4,5	8,9	41,8	60,4	53,7	30,7	100	100
2007	6,3	5,8	39,7	45,4	54,0	48,8	100	100
2008	4,8	2,3	43,5	30,4	51,7	67,4	100,0	100,0
2009	4,0	4,3	38,8	35,4	57,2	60,3	100,0	100,0

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah

Terjadinya pergeseran struktur PMA dari sektor sekunder ke sektor tersier ini secara lebih rinci bisa dilihat dari besarnya investasi dan banyaknya proyek di sub sektor masing-masing. Pada tahun 2002-2004, beberapa sub sektor dalam sektor sekunder seperti sub sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi; sub sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronika; dan sub sektor industri tekstil; serta sub sektor industri makanan merupakan sub sektor yang paling banyak diminati oleh investor asing.

Dalam perkembangannya sejak tahun 2005, investor asing mulai melakukan penetrasi dan ekspansi di sektor tersier, khususnya di sub sektor pengangkutan, gudang dan komunikasi, sub sektor

perdagangan dan reparasi; serta sub sektor jasa lainnya. Sub sektor komunikasi semakin diminati oleh investor asing karena pasar domestik untuk sub sektor ini, khususnya telepon seluler sedang tumbuh pesat. Dalam pandangan Negara, et al. (2009), pergeseran yang terjadi dalam pemilihan investasi sektoral PMA dari sektor sekunder menjadi sektor tersier salah satunya disebabkan oleh semakin rendahnya tingkat daya saing sektor sekunder (manufaktur). Hal ini terjadi karena tingkat daya saing sektor manufaktur Indonesia yang umumnya masih bersifat *labour intensive* kalah bersaing dengan sektor manufaktur di negara lain yang upah buruhnya jauh lebih murah, seperti Cina, India, dan Vietnam.

Terkait dengan data investasi di atas, satu hal yang menarik untuk digarisbawahi adalah terjadinya lonjakan PMA yang cukup fantastis ketika memasuki tahun 2007. Pada tahun ini, jumlah investasi tumbuh mencapai 72,6% dan jumlah IUT meningkat sebesar 13%. Salah satu faktor utama yang diduga kuat berkontribusi dalam lonjakan investasi pada tahun ini adalah diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Faktor lain yang juga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan investasi pada masa ini adalah mulai dirasakannya pengaruh dari paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2006 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2006.

Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing karena memberikan banyak kemudahan, fasilitas, dan tidak diskriminatif baik kepada investor dalam maupun luar negeri. Secara lebih khusus, beberapa aspek dalam UU tersebut yang dinilai cukup pro dan menguntungkan bagi investor asing meliputi: (a) adanya perlakuan yang sama kepada semua investor tanpa memandang asal negara investor, baik dalam proses perizinan, kepastian hak, proses hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan undang-undang; (b) adanya kebebasan dalam melakukan alih kepemilikan aset sesuai keinginan investor selama tidak menyalahi undang-undang; (c) diberikannya hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing untuk transaksi keuangan tertentu; (d) semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan investasi, kecuali bidang usaha yang tertutup dan dilarang oleh undang-undang atau ketentuan hukum lain; (e) disediakannya fasilitas-fasilitas investasi bagi investor yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh UU, fasilitas ini meliputi fasilitas di bidang perpajakan dan bea masuk; (f) kemudahan pelayanan dalam hal perizinan investasi, kemudahan perolehan hak atas tanah dengan waktu yang sangat panjang hingga mencapai 95 tahun, kemudahan proses keimigrasian dan perizinan impor; (g) kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan (h) rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Keyakinan investor bahwa pemerintah bersungguh-sungguh membuka pintu bagi masuknya PMA semakin kuat ketika pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres ini dikeluarkan bulan Juni 2007

atau sekitar 40 hari setelah pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007. Beberapa kebijakan penting dalam Inpres ini bisa dikatakan merupakan penjabaran dari UU tersebut yang terkait langsung dengan upaya menarik masuknya PMA. Kebijakan yang dikeluarkan meliputi perbaikan iklim investasi dengan memberikan penekanan pada penyusunan tata cara dan pelaksanaan PTSP, perumusan pemberian fasilitas fiskal bagi investor, dan perumusan kebijakan investasi di KEK. Kebijakan lain dalam Inpres ini adalah kebijakan untuk memperlancar arus barang dan kepabeanan dengan penekanan pada perbaikan infrastruktur dan pelayanan pelabuhan Tanjung Priok, mempercepat pelayanan kepabeanan, dan pengembangan fasilitas kepabeanan.

Keluarnya UU penanaman modal baru dan paket kebijakan perbaikan iklim investasi, serta paket kebijakan percepatan pengembangan sektor riil ini sebenarnya bisa dikatakan terlambat. Posisi dan daya saing investasi Indonesia sebelum tahun 2007 sudah masuk kategori cukup memprihatinkan dalam pandangan dunia internasional. Dalam konteks perbandingan dengan negara lain khususnya di level ASEAN saja, potret perkembangan PMA Indonesia ini sebenarnya cukup jauh tertinggal. Menurut catatan UNCTAD (2008), PMA yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 2004–2007 menunjukkan tren yang menurun. Sementara beberapa negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam justru mengalami pertumbuhan positif.

Posisi Indonesia di mata lembaga-lembaga pemeringkat internasional bahkan ditempatkan sebagai negara yang kurang memiliki daya tarik bagi masuknya investasi asing. Menurut laporan dari *World Economic Forum* (WEF), posisi indeks daya saing bisnis (*The Business Competitiveness Index/BCI*) Indonesia pada tahun 2004 masih berada di peringkat 44, terpaut jauh di bawah tiga negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura (10), Malaysia (23), dan Thailand (37). Lebih parahnya lagi, pada tahun 2005 posisi BCI Indonesia semakin terpuruk di posisi 59, sementara tiga negara ASEAN lainnya masih bertahan di atas Indonesia. (*The Global Competitiveness Report* 2004–2005 dan 2005–2006).

Penilaian lain yang dilakukan oleh UNCTAD (2007) menempatkan Indonesia pada kelompok negara yang tidak terlalu diminati oleh PMA. Penilaian ini didasarkan pada indikator aspek indeks kinerja PMA (IKPMA) yang dikombinasikan dengan

indeks potensi arus masuk PMA (IPPMA)<sup>2</sup>. Hasil survei lain yang dilakukan oleh ATKearney 2007 juga menunjukkan bahwa dari 25 negara yang paling diminati sebagai tujuan FDI, Indonesia hanya menempati urutan ke-21 berada di bawah negara Asia lainnya seperti China, India, Singapura, Vietnam, Jepang, dan Malaysia (Yuliana, 2008).

Menurut penilaian WEF, salah satu faktor utama yang menyebabkan semakin rendahnya daya saing bisnis di Indonesia adalah karena minim dan rendahnya kualitas infrastruktur fisik penunjang investasi serta masih belum terbangunnya pasar keuangan yang diharapkan mampu menopang perkembangan investasi. Sementara investor dari Asia Timur seperti Jepang menilai bahwa salah satu faktor yang masih dikhawatirkan oleh investor adalah kondisifitas lingkungan usaha. Hal ini bisa dilihat dalam hasil survei JICA (2007) terhadap para pengusaha Jepang yang menempatkan Indonesia pada urutan 9 sebagai negara tujuan investasi Jepang. Padahal tahun 2005, Indonesia masih berada diurutan ke-8. Penyebab turunnya peringkat ini terkait dengan banyaknya keluhan pengusaha Jepang terhadap aspek kepastian hukum, perpajakan, bea dan cukai, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

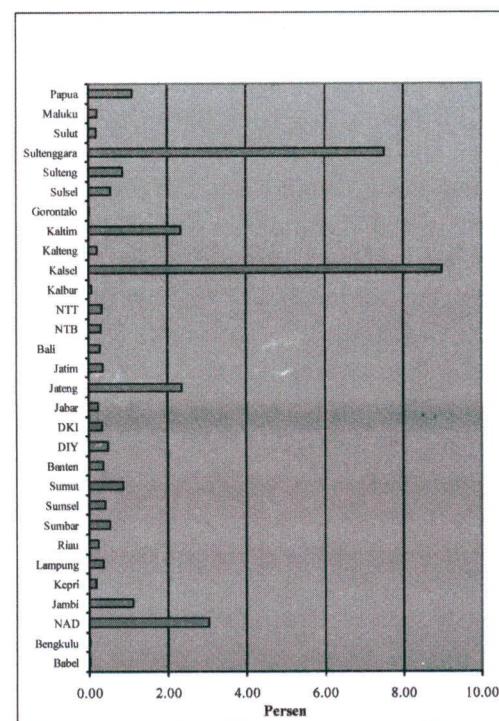
### Ketimpangan Persetujuan dengan Realisasi PMA

Kegiatan investasi asing baik tiap provinsi maupun dalam lingkup nasional didasarkan atas persetujuan yang telah dikeluarkan BKPM. Namun, realisasi PMA dari yang sudah disetujui sebelumnya masih relatif rendah. Pada umumnya tingkat realisasi PMA di berbagai provinsi di Indonesia selama periode 2002–2007 masih di bawah 1 persen. Namun demikian ada beberapa daerah yang tingkat rata-rata realisasinya lebih besar dari 1%. Tingkat rata-rata

<sup>2</sup> IKPMA adalah ukuran besarnya arus masuk PMA yang diterima oleh sebuah negara relatif terhadap besarnya ekonomi dari negara tersebut. Indeks ini dihitung sebagai rasio pangsa dari sebuah negara di dalam total arus masuk PMA di dunia terhadap pangsaanya di dalam total PDB dunia. Sedangkan IPPMA didasarkan pada 12 variabel ekonomi dan struktural yang diukur dengan skor relatif dari variabel-variabel tersebut pada suatu urutan angka antara 0 hingga 1. Indeks ini adalah rata-rata tidak tertimbang dari skor-skor sebagai berikut: PDB per kapita, laju pertumbuhan PDB, pangsa ekspor di dalam PDB, infrastruktur telekomunikasi (jumlah sambungan telepon rata-rata per 1000 penduduk dan jumlah HP per 1000 penduduk), pemakaian energi komersial per kapita, pangsa dari pengeluaran R&D di dalam pendapatan nasional bruto, pangsa dari mahasiswa tersier di dalam jumlah populasi, resiko negara, ekspor dari SDA sebagai suatu persentase dari total dunia, impor dari bagian-bagian dan komponen-komponen dari elektronik dan otomotif sebagai suatu persentase dari total dunia, ekspor jasa sebagai suatu persentase dari total dunia, dan stok PMA masuk sebagai suatu persentase dari total dunia (Tambunan, 2007).

realisasi PMA di provinsi Jambi, NAD, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua berkisar antara 1–3%. Sedangkan tingkat realisasi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan sudah di atas 5% (lihat Grafik 4).

Tingkat rata-rata realisasi PMA semua provinsi di Pulau Jawa selama periode 2002–2007 ternyata masih sangat kecil yaitu kurang dari satu%. Nilai persetujuan investasi asing provinsi DKI Jakarta telah mencapai US\$ 548 miliar, namun realisasinya hanya sebesar US\$ 1,9 miliar (0,35%). Demikian pula halnya dengan Jawa Barat, nilai persetujuan PMA-nya sebesar US\$ 428 miliar dan realisasinya baru mencapai 2,6% atau senilai US\$ 1,1 miliar, padahal realisasi PMA yang terbesar diperoleh kedua provinsi tersebut. Rendahnya realisasi PMA menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan PMA hanya berupa ekspansi usaha. Kondisi ini terjadi sebelum ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2007. Gambaran ini mencerminkan pentingnya jaminan atas kegiatan investasi sehingga diterbitkannya UU 25 Tahun 2007 diharapkan akan meningkatkan realisasi PMA.



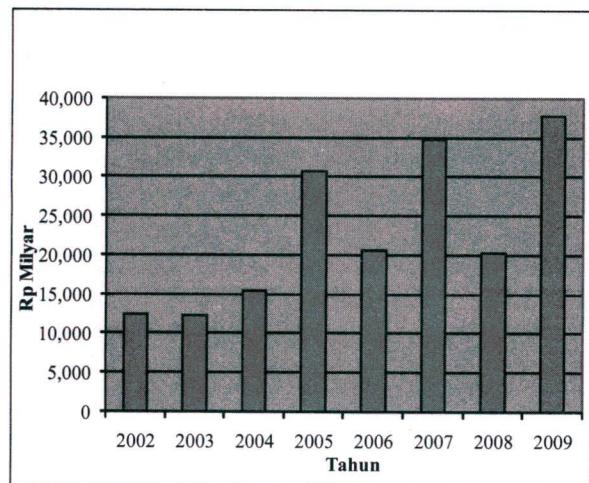
**Grafik 4.** Persentase rata-rata realisasi terhadap persetujuan PMA periode 2002–2007

### ANALISIS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Sebelum masuk pada pembahasan peta PMDN menurut lokasi dan sektor ekonomi, terlebih dahulu

akan dikemukakan analisis perkembangan PMDN secara global selama kurun waktu 2002–2009. Secara rata-rata, nilai realisasi PMDN telah mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 29% per tahun selama delapan tahun terakhir. Adapun jumlah rata-rata Izin Usaha Tetap (IUT) sebanyak 173 buah setiap tahun dengan laju pertumbuhan 16% per tahun. Sebagaimana terlihat pada Grafik 5 di bawah ini, tren realisasi PMDN tersebut tidak stabil, melainkan cukup fluktuatif. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2005, 2006, dan 2007, masing-masing mencapai 99%, 67% dan 86%.

Bila diperhatikan data pada grafik di atas bisa muncul berbagai pertanyaan antara lain: apakah perkembangan nilai realisasi PMDN tersebut sudah dapat dikatakan tinggi atau menggembirakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dikemukakan analisis perbandingan dengan nilai realisasi PMDN



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

**Grafik 5.** Perkembangan nilai realisasi PMDN periode 2002–2009

periode sebelumnya (1990–1997). Dari sudut pandang besarnya nilai, realisasi PMDN periode 2002–2009 memang lebih besar dibandingkan dengan realisasi nilai PMDN periode sebelumnya, terutama semenjak tahun 2005, yang puncaknya mencapai Rp37,8 triliun pada tahun 2009. Nilai realisasi pada tahun 2009 tersebut hampir dua kali lipat nilai tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 1997 yaitu sebesar Rp18,6 triliun. Akan tetapi, rata-rata laju pertumbuhan periode 2002–2009 sebesar 29% per tahun, masih relatif lambat dibanding laju pertumbuhan periode sebelumnya yaitu 37% per tahun. Jumlah proyek (IUT) periode 1990–1997 juga lebih banyak yaitu mencapai 350 buah per tahun dengan laju pertumbuhan 11% setiap tahun.

Relatif lambatnya perkembangan penanaman modal ini sangat erat kaitannya dengan iklim investasi. Jangan berharap dapat menarik investor dalam dan luar negeri, tanpa berupaya memperbaiki lingkungan bisnis menjadi sehat. Menurut Kuncoro (2005), berbagai survei membuktikan, faktor utama yang memengaruhi lingkungan bisnis adalah: tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPOD (2002) menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah, dan produktivitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih dari 2.000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2000) menemukan bahwa alasan utama di balik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

Berbagai penyebab lain kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2005).

- 1) Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia (misal: Hofman, et al. 2003; Smeru, 2001; Ray, 2003, 2002). Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak “pro-bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Ini diperparah oleh masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).

- 2) Hasil studi Kuncoro bersama Pusat Studi Asia Pasifik UGM tahun 2005 menunjukkan

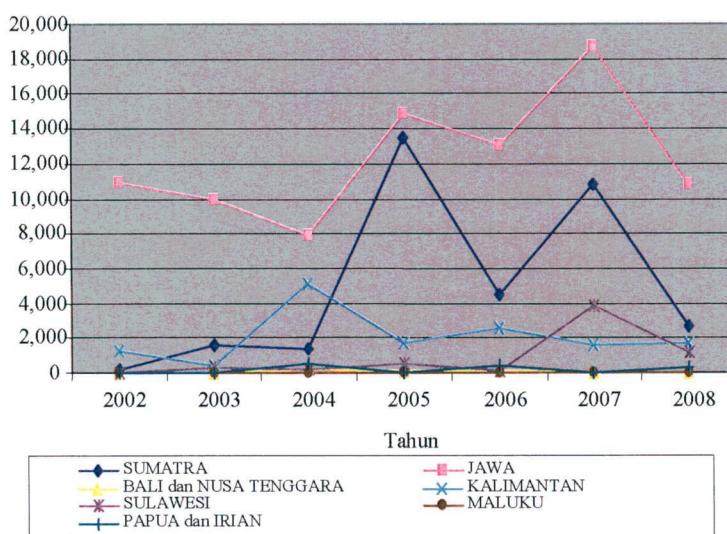
masih adanya “*grease money*” dalam bentuk pungli, upeti, dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses *input* menjadi *output*, sampai ekspor. Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perizinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dll) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor. Rata-rata persentase pungli terhadap biaya ekspor setahun adalah 7,5%, yang diperkirakan sebesar Rp 3 triliun atau sekitar 153 juta dolar AS. Lokasi yang dituding rawan terhadap pungli terutama jalan raya dan pelabuhan.

- 3) Lingkungan perizinan Indonesia memang terus disorot. Survei UNCTAD (2004) baru-baru ini, dengan judul *World Investment Report 2004*, mencatat bahwa peringkat Indonesia berada dalam papan bawah, yaitu nomor 2 dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasi. Betapa tidak, waktu untuk mengurus izin investasi masih dikeluhkan terlalu lama (151 hari untuk memulai bisnis baru), prosedur ekspor yang lambat dan kompleks sehingga membuat biaya logistik dan transpor menjadi tidak kompetitif, ditambah korupsi yang masih berlanjut di bea cukai dan pelabuhan.
- 4) Dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah menerapkan beberapa pungutan, pajak, sumbangan sukarela, dan

pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegiatan bisnis. Usaha tersebut ternyata mengakibatkan distorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan UU No. 34/2000. Situasi ini menyebabkan lebih banyak kekhawatiran, khususnya di kalangan investor domestik dan asing. Pemerintah daerah bersikeras akan hak atas kepemilikan saham pelabuhan dan pajak dari perusahaan asing yang beroperasi di daerahnya, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. Fanatismenya sektoral mulai bergeser menjadi fanatismenya daerah yang overdosis.

### Peta PMDN Menurut Lokasi

Idealnya PMDN menyebar secara lebih merata dan berimbang antardaerah, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati bersama-sama oleh semua daerah. Namun kenyataannya, penyebaran investasi dalam bentuk PMDN sangat timpang antardaerah. Peta PMDN menurut lokasi dapat dilihat menurut pulau dan provinsi. Pada tahap awal, akan dikemukakan terlebih dahulu penyebaran PMDN menurut pulau. Pada tahun 2002, sekitar 98% PMDN menumpuk di Jawa (87%) dan Kalimantan (11%). Selanjutnya, mulai tahun 2005, pola penyebaran PMDN mulai bergeser dari Kalimantan ke Sumatra, sedangkan Jawa masih tetap menjadi tujuan utama. Pada tahun 2007, realisasi PMDN mulai kelihatan menonjol di Sulawesi yaitu mencapai 3,8 triliun (11%), namun hal ini tidak bertahan lama karena tahun berikutnya mulai merosot kembali.



**Grafik 6.** Nilai investasi PMDN, tahun 2002–2008 (Rp Miliar)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Ketimpangan distribusi PMDN ternyata bukan hanya terjadi menurut pulau, namun penyebaran antarprovinsi dalam suatu pulau pada umumnya juga sangat timpang. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4 di bawah ini, pada tahun 2002, PMDN di Pulau Jawa lebih banyak berlokasi di Jawa Barat (73%) dan DKI Jakarta (16%). Selanjutnya secara perlahan mulai menyebar lebih merata ke Jawa Timur dan Banten. Dengan demikian, ada empat provinsi di Jawa pada tahun 2008 yang menjadi lokasi utama PMDN, yaitu Jawa Barat (34%), Jawa Timur (24%), Banten (18%) dan DKI Jakarta (16%). Sementara itu, di Pulau Sumatra, provinsi yang banyak menarik PMDN adalah Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, dan Sumatra Barat. Pada tahun 2002, tidak ada PMDN yang masuk ke Riau, namun semenjak tahun 2005, PMDN yang masuk ke Sumatra lebih banyak mengalir ke Riau. Untuk tahun 2008, Riau berhasil merealisasi PMDN sebesar Rp 1,15 triliun (43% dari total PMDN di Sumatra). Sedangkan di Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung hampir tidak ada PMDN yang masuk. Ketimpangan antar provinsi yang paling kentara terjadi di Sulawesi, di mana hanya Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu

menarik investor domestik setiap tahun dengan tren yang meningkat. Sementara itu, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo sama sekali belum berhasil menarik kegiatan PMDN selama periode 2002–2008.

Mencermati data yang diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan: mengapa bisa terjadi ketimpangan penyebaran PMDN secara signifikan antarpulau dan antarprovinsi? Menurut Tambunan (2001), terpusatnya investasi di Pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya yang penting adalah kebijakan dan birokrasi yang terpusat selama pemerintahan orde baru serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa. Faktor-faktor ini sangat penting terutama bagi proyek investasi yang tidak terlalu tergantung pada ketersediaan bahan baku lokal (*footlose investment*), seperti investasi di sektor industri tekstil, komputer, dan permesinan. Sedangkan investasi di sektor pertambangan dan pertanian hingga tingkat tertentu (tergantung jenis komoditas) mau tidak mau memang harus dilakukan di wilayah yang terdapat komoditas-komoditas pertambangan atau pertanian yang dibutuhkan.

**Tabel 4.** Perkembangan Nilai Realisasi PMDN 2002–2008 (Rp Miliar)

LOKASI	Tahun			
	2002	2004	2006	2008
<b>BALI dan NUSA TENGGARA</b>	<b>46,3</b>	<b>240,5</b>	<b>104,8</b>	<b>29,0</b>
Bali	31,6	66,1	40,7	29,0
Nusa Tenggara Barat	14,7	60,0	64,2	0,0
Nusa Tenggara Timur	0,0	114,3	0,0	0,0
<b>JAWA</b>	<b>10.878,1</b>	<b>7.886,2</b>	<b>13.030,8</b>	<b>10.815,6</b>
DKI Jakarta	1.766,1	3.731,2	3.088,0	1.751,3
Jawa Barat	7.907,3	2.783,4	5.314,4	3.679,2
Jawa Tengah	663,3	99,1	275,8	880,4
Di Yogyakarta	65,1	14,2	20,0	0,0
Jawa Timur	146,7	426,9	517,5	2.555,6
Banten	329,6	831,4	3.815,2	1.949,1
<b>KALIMANTAN</b>	<b>1.330,4</b>	<b>5.141,8</b>	<b>2.536,0</b>	<b>1.750,6</b>
Kalimantan Barat	306,7	0,0	80,3	248,1
Kalimantan Tengah	0,0	0,0	1.198,6	681,9
Kalimantan Selatan	193,9	29,3	1.010,1	592,7
Kalimantan Timur	829,8	5.112,5	247,1	227,8
<b>MALUKU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
Maluku	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>PAPUA dan IRJA</b>	<b>10,1</b>	<b>545,1</b>	<b>403,5</b>	<b>294,7</b>
Irian Jaya Barat	10,1	0,0	0,0	0,0
Papua	0,0	545,1	403,5	294,7
<b>SULAWESI</b>	<b>36,0</b>	<b>164,4</b>	<b>68,6</b>	<b>1.147,5</b>
Sulawesi Utara	3,5	0,9	0,0	42,2
Sulawesi Tengah	1,7	54,5	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	30,8	18,1	68,6	1.105,2
Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0
Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	0,0	90,9	0,0	0,0
<b>SUMATRA</b>	<b>199,0</b>	<b>1.431,3</b>	<b>4.505,0</b>	<b>2.693,4</b>
NAD	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Utara	64,2	593,7	594,2	346,5
Sumatera Barat	11,7	490,7	74,4	0,0
Riau	0,0	86,1	2.500,9	1.146,1
Jambi	0,0	207,6	31,0	74,7
Sumatera Selatan	17,1	39,6	697,4	375,6
Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	81,8	13,2	607,0	674,2
Kep. Babel	0,0	0,0	0,0	2,0
Kepulauan Riau	24,2	0,4	0,0	74,4
<b>Total</b>	<b>12.500,0</b>	<b>15.409,4</b>	<b>20.649,0</b>	<b>16.730,8</b>

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

## Peta PMDN Menurut Sektor Ekonomi

Bila diamati secara sektoral, baik dari sisi jumlah proyek maupun nilai investasi, sektor sekunder secara konsisten menjadi kontributor utama dalam menyerap PMDN selama periode 2002-2008. Dari Tabel 5 dan Tabel 6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 hampir 80% dari Rp12,5 triliun PMDN disalurkan pada usaha-usaha di sektor sekunder, sedangkan sisanya sebesar Rp0,9 triliun (7%) mengalir ke sektor primer dan Rp1,6 triliun (13%) ke sektor tersier. Pada perkembangan berikutnya, sebagian besar PMDN masih terkonsentrasi pada bidang-bidang usaha di sektor sekunder, namun porsinya cenderung berkurang sejalan dengan

meningkatnya porsi PMDN di sektor tersier dan primer. Kondisi tahun 2009 menunjukkan porsi PMDN sektor sekunder telah menurun menjadi 51%, sedangkan PMDN di sektor tersier melonjak menjadi 37% dan PMDN sektor primer meningkat menjadi 12%.

Alasan perubahan pola distribusi PMDN menurut sektor ini sulit untuk dikemukakan secara gamblang karena masing-masing investor mempunyai pertimbangan sendiri. Namun, secara umum dapat diperkirakan bahwa salah satu faktor pendorong bergesernya PMDN dari sektor sekunder ke tersier dan primer adalah terjadinya kenaikan BBM yang cukup tinggi pada Oktober 2005. Kenaikan harga BBM ini telah memukul sektor

**Tabel 5.** Izin Usaha Tetap (IUT) dan Realisasi PMDN Menurut Sektor Usaha Periode 2002–2009

Tahun	Sektor Primer		Sektor Sekunder		Sektor Tersier		Jumlah	
	IUT	Investasi (Rp miliar)	IUT	Investasi (Rp miliar)	IUT	Investasi (Rp miliar)	IUT	Investasi (Rp miliar)
2002	8	897,4	77	9.968,9	23	1.633,7	108	12.500,0
2003	12	610,1	86	6.586,4	22	5.050,5	120	12.247,0
2004	10	975,5	97	10.662,6	23	3.771,3	130	15.409,3
2005	31	5.577,2	149	20.991,3	35	4.155,8	215	30.724,3
2006	29	3.599,8	96	13.012,7	37	4.036,5	162	20.649,0
2007	29	4.377,3	101	26.289,8	29	4.211,6	159	34.878,7
2008	13	1.757,7	189	15.914,8	37	2.690,8	239	20.363,4
2009	32	4.415,9	158	19.434,4	58	13.949,5	248	37.799,8

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (Diolah)

**Tabel 6.** Porsi IUT dan Nilai Investasi PMDN di Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2002–2008

Tahun	Sektor Primer		Sektor Sekunder		Sektor Tersier		Jumlah	
	IUT (%)	Investasi (%)	IUT (%)	Investasi (%)	IUT (%)	Investasi (%)	IUT (%)	Investasi (%)
2002	7.4	7.2	71.3	79.8	21.3	13.1	100	100
2003	10.0	5.0	71.7	53.8	18.3	41.2	100	100
2004	7.7	6.3	74.6	69.2	17.7	24.5	100	100
2005	14.4	18.2	69.3	68.3	16.3	13.5	100	100
2006	17.9	17.4	59.3	63.0	22.8	19.5	100	100
2007	18.2	12.6	63.5	75.4	18.2	12.1	100	100
2008	5.4	8.6	79.1	78.2	15.5	13.2	100	100
2009	12.9	11.7	63.7	51.4	23.4	36.9	100	100

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, (diolah)

sekunder yang umumnya membutuhkan BBM sebagai salah satu komponen utama dalam *input* produksinya. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari penurunan jumlah IUT di sektor sekunder yang mencapai 33% pada tahun 2006. Selain kenaikan BBM, faktor lain yang diduga menjadi penyebab turunnya investasi PMDN sektor sekunder tahun 2006 adalah terjadinya defisit listrik yang cukup besar sejak tahun 2005, masalah perburuan, harmonisasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak penghasilan.

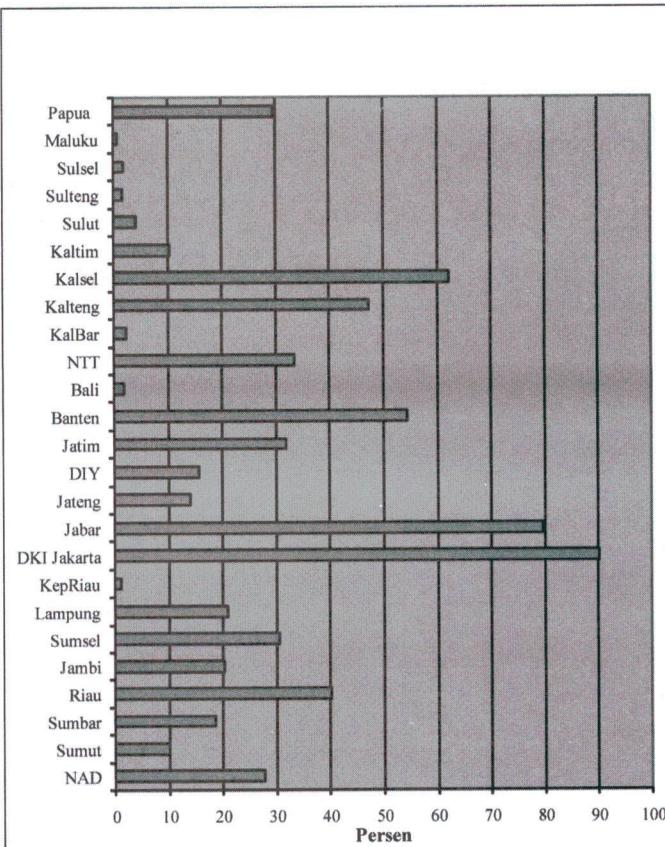
Apabila ditelusuri lebih jauh, ada delapan sektor usaha yang lebih banyak dipilih oleh investor domestik berdasarkan data tahun 2009. Ketujuh sektor tersebut adalah industri kimia dan farmasi (15,5%); industri makanan (15,3%); jasa lainnya (13,3%); listrik, gas, dan air (9,1%); konstruksi (7,3%); industri tekstil (7,0%); tanaman pangan dan perkebunan (6,1%); dan pertambangan (4,7%). Dalam jangka panjang, menurut Wei (*Kompas*, 15 September 2003), sub-sub sektor yang mempunyai peluang menjadi sangat kuat untuk dikembangkan di Indonesia adalah industri pengolahan makanan, agribisnis, dan elektronik sederhana.

### Persetujuan dan Realisasi

Secara umum realisasi PMDN masih jauh di bawah nilai yang disetujui, terutama di Indonesia Bagian Timur. Namun demikian, persentase PMDN yang direalisasikan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat realisasi PMA yang pada umumnya di bawah 1% selama periode yang pengamatan. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 7, tingkat realisasi PMDN yang melebihi 50% dibandingkan angka persetujuan terdapat di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan tingkat rata-rata realisasi PMDN yang relatif rendah (di bawah 10%) selama periode 2002-2006 terdapat di provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau.

Rendahnya realisasi investasi itu mencerminkan sikap menunggu dari para investor. Hal ini menurut Saleh (2007) antara lain terkait dengan belum selesainya pembahasan RUU Investasi<sup>3</sup>, RUU Pajak, dan RUU Tenaga Kerja. Faktor penyebab kedua yang perlu mendapatkan perhatian adalah keterkaitan antara peningkatan daya beli dalam negeri dengan penciptaan lapangan kerja yang cenderung

merenggang. Data memperlihatkan, perbaikan sektor riil menunjukkan peningkatan dalam tiga kuartal terakhir 2006. Tapi penggunaan kapasitas produksi yang ada menunjukkan penurunan. Hal ini diduga berkaitan dengan kecenderungan para produsen atau pengusaha yang enggan meningkatkan produksi untuk menjawab kebutuhan pasar. Sebaliknya mereka malah sibuk memperdagangkan barang impor—sebagian malah selundupan—yang laku keras di pasar. Faktor ketiga, peran aktor ekonomi daerah belum cukup. Faktor ketiga ini yang layak sekali kita perhatikan, karena kini sekitar 30% dari pengeluaran APBN dialokasikan ke daerah (dalam APBN 2007, sebesar Rp 259 triliun dari total pengeluaran APBN Rp 764 triliun). Kini, tidak kurang dari tiga perempat pegawai negeri telah menjadi pegawai daerah. Fungsi-fungsi pelayanan publik, yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat kini nyaris semuanya menjadi kewenangan dan tanggung-jawab daerah. Hanya tertinggal enam urusan saja yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni politik LN, moneter dan fiskal nasional, pertahanan, keamanan, yustisi dan agama.



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah

Grafik 7. Persentase Rata-rata Realisasi Terhadap Persetujuan PMDN Periode 2002–2006

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal telah disahkan pada tahun 2007.

## ANALISIS PERANAN PMA DAN PMDN DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA

Data penyerapan tenaga kerja oleh PMA dan PMDN pada periode 2005–2007 disajikan dalam Tabel 7. Secara agregat, PMA mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan penyerapan tenaga kerja oleh PMDN. Pada tahun 2005, total

penyerapan tenaga kerja oleh PMA dan PMDN sebanyak 280.007 orang. Dari jumlah itu, tingkat penyerapan tenaga kerja oleh PMA mencapai 156.071 (56 %) dan penyerapan tenaga kerja oleh PMDN 123.936 orang (44 %). Kemampuan PMA dalam menyerap tenaga kerja terlihat semakin besar pada tahun 2006 dan 2007 yaitu masing-masing mencapai 72 % dan 68 % dari total penyerapan tenaga kerja PMA dan PMDN.

**Tabel 7.** Penyerapan Tenaga Kerja PMA & PMDN Menurut Sektor, Tahun 2005–2007

SEKTOR	2005		2006		2007	
	PMA (orang)	PMDN (orang)	PMA (orang)	PMDN (orang)	PMA (orang)	PMDN (orang)
<b>SEKTOR PRIMER</b>	<b>23.172</b>	<b>36.674</b>	<b>26.416</b>	<b>35.309</b>	<b>21.192</b>	<b>32.383</b>
Kehutanan	2.769	2.200	325	202		1.539
Perikanan	668	351	1.075	132	902	30
Pertambangan	2.148	1.893	1.099	106	3.122	1.182
Peternakan	711	196	3.308	744	4.073	999
Tanaman Pangan & Perkebunan	16.876	32.034	20.609	34.125	13.095	28.633
<b>SEKTOR SEKUNDER</b>	<b>97.257</b>	<b>79.580</b>	<b>152.815</b>	<b>38.599</b>	<b>138.476</b>	<b>49.506</b>
Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya	7.436	1.438	12.751	1.195	13.978	1.764
Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	56		42		94	
Ind. Barang Karet & Barang Plastik	10.209	3.615	6.744	1.849	5.005	1.957
Ind. Kayu	5.090	1.598	6.854	6.732	8.631	464
Ind. Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	668	8.059	6.153	2.061	2.186	8.196
Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	11.312	20.492	4.488	5.823	3.643	2.463
Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	5.652	2.007	7.886	110	22.592	606
Industri Lainnya	8.148	1.662	5.115		4.096	489
Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektronika	17.980	2.882	21.257	2.561	22.058	2.950
Ind. Makanan	13.137	23.863	12.729	12.734	16.845	27.525
Ind. Tekstil	15.422	10.862	67.335	4.587	38.384	2.448
Ind. Min. Non Logam/Non Metal Min. Ind.	2.147	3.102	1.461	947	964	644
<b>SEKTOR TERSIER</b>	<b>35.642</b>	<b>7.682</b>	<b>27.714</b>	<b>5.339</b>	<b>21.211</b>	<b>5.002</b>
Elektrik, Gas Dan Air	113		1.456	105	497	305
Hotel Dan Restoran	4.332	1.393	2.424	567	2.307	702
Jasa Lainnya	4.629	2.055	4.819	1.562	4.509	427
Konstruksi	3.790	588	2.830	761	1.551	2.426
Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	8.268	3.368	3.969	1.178	3.735	781
Perdagangan & Reparasi	14.379	185	10.788	1.007	8.262	361
Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran	131	93	1.428	158	350	
Total	<b>156.071</b>	<b>123.936</b>	<b>206.945</b>	<b>79.247</b>	<b>180.879</b>	<b>86.891</b>

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

**Tabel 8.** Rasio Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2005–2007

SEKTOR	2005		2006		2007	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
<b>SEKTOR PRIMER</b>	<b>174</b>	<b>152</b>	202	<b>102</b>	<b>282</b>	<b>135</b>
Kehutanan	429	452	953	99	0	6
Perikanan	87	14	305	2	274	103
Pertambangan	249	740	892	198	992	585
Peternakan	742	552	57	155	110	145
Tanaman Pangan & Perkebunan	102	96	171	101	167	123
<b>SEKTOR SEKUNDER</b>	<b>360</b>	<b>264</b>	237	<b>337</b>	<b>339</b>	<b>531</b>
Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya	485	198	344	98	295	345
Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	557	0	45	0	1.154	0
Ind. Barang Karet & Barang Plastik	385	188	167	137	315	288
Ind. Kayu	148	124	86	105	148	84
Ind. Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	149	1.208	1.214	908	3.076	1.775
Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	1.019	95	590	558	4.424	474
Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	85	7	66	36	42	96
Industri Lainnya	240	48	229	0	74	75
Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektronika	290	400	450	1.302	324	1.201
Ind. Makanan	459	188	278	249	418	195
Ind. Tekstil	46	151	63	18	34	93
Ind. Min. Non Logam/Non Metal Min. Ind.	308	250	649	230	288	193
<b>SEKTOR TERSIER</b>	<b>1.405</b>	<b>541</b>	664	<b>756</b>	<b>2.379</b>	<b>842</b>
Elektrik, Gas Dan Air	6.077	0	723	838	2.400	2.447
Hotel Dan Restoran	416	193	460	318	591	182
Jasa Lainnya	653	352	300	1.031	1.080	1.868
Konstruksi	2.423	4.058	509	1.204	2.890	870
Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	3.564	189	1.628	721	8.848	367
Perdagangan & Reparasi	267	497	402	343	585	396
Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran	15.899	504	1.779	289	1.907	0
<b>Total</b>	<b>571</b>	<b>248</b>	<b>290</b>	<b>261</b>	<b>572</b>	<b>401</b>

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah

Bila dihitung rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja, maka diketahui bahwa rasio investasi per tenaga kerja untuk PMA jauh lebih tinggi dari rasio investasi per tenaga kerja di PMDN. Pada tahun 2005, rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja di PMA mencapai 571, sementara rasio di PMDN 248. Artinya, setiap 571 juta rupiah investasi PMA hanya menyerap 1 orang tenaga kerja, sementara di PMDN untuk menyerap 1 orang tenaga kerja hanya dibutuhkan investasi Rp248 juta. Pada tahun 2006 dan 2007, rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja di PMDN cenderung mengalami peningkatan, namun demikian rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja di PMA masih tetap berada di atas rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja di PMDN. Hal ini mengindikasikan bahwa PMA lebih bersifat *capital intensive* dibandingkan dengan PMDN.

Secara sektoral, dalam periode 2005–2007 peringkat tertinggi rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik di PMA maupun PMDN sama yaitu sektor tersier. Sementara itu, sektor sekunder berada di urutan kedua dan sektor primer di tempat ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier merupakan sektor yang lebih bersifat *capital intensive* dibandingkan dengan kedua sektor lainnya. Lebih lanjut data di atas memperlihatkan bahwa ada kecenderungan tingkat rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor tersier semakin meningkat. Di PMDN rasio ini pada tahun 2005 sebesar 541, lalu meningkat menjadi 842 di tahun 2007. Sementara di PMA, rasio pada tahun 2005 sebesar 1.405, kemudian melonjak menjadi 2.379 di tahun 2007. Ini artinya dibutuhkan investasi yang lebih besar di sektor tersier untuk menyerap per satu orang tenaga kerja baik di PMDN dan terlebih di PMA.

Jika dalam jangka menengah penambahan investasi baru di sektor ini tidak tumbuh signifikan, maka dikhawatirkan akan berdampak kurang menguntungkan bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia, khususnya yang mempunyai keterampilan di sektor tersier. Fenomena ini sudah terlihat dalam

data porsi penyerapan tenaga kerja sektoral ini di mana kemampuan sektor tersier dalam menyerap tenaga kerja semakin berkurang. Pada tahun 2005, porsi sektor tersier dalam menyerap tenaga kerja sebesar 22,8% dari total penyerapan tenaga kerja PMA. Angka ini menurun menjadi 11,7% di tahun 2007. Rendahnya kemampuan sektor dengan *high capital intensive* dalam penyerapan tenaga kerja sudah banyak dikemukakan dalam berbagai studi. Salah satu studi terbaru yang dilakukan oleh Siwage D.N., et al. (2009) tentang *spillover effect* PMA terhadap penyerapan tenaga kerja menjelaskan bahwa industri yang semakin bersifat *high capital intensity* dan menglokasikan biaya *Research & Development* (R & D) yang tinggi cenderung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Sejauh ini, secara sektoral, penyerapan tenaga kerja terbesar untuk PMA dan PMDN berada di sektor sekunder. Pada tahun 2005, porsi sektor sekunder dalam menyerap tenaga kerja di PMA dan PMDN masing-masing 62% dan 64%. Dalam perkembangannya, penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder oleh PMA terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 dan 2007, porsi sektor sekunder PMA terhadap penyerapan tenaga kerja total di PMA sudah mencapai 74% dan 77%. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder oleh PMDN mengalami penurunan ke level 49% pada tahun 2006 dan 57% pada tahun 2007. Bila diamati data rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja, maka terlihat bahwa rasio investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor sekunder PMDN cenderung meningkat, yang artinya semakin mengarah kepada investasi yang bersifat *capital intensive*.

**Tabel 9.** Porsi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Sektor (%) Tahun 2005–2007

SEKTOR						
	2005		2006		2007	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
	%	%	%	%	%	%
<b>SEKTOR PRIMER</b>	<b>14,8</b>	<b>29,6</b>	<b>12,8</b>	<b>44,6</b>	<b>11,7</b>	<b>37,3</b>
Kehutanan	1,8	1,8	0,2	0,3	0,0	1,8
Perikanan	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5	0,0
Pertambangan	1,4	1,5	0,5	0,1	1,7	1,4
Peternakan	0,5	0,2	1,6	0,9	2,3	1,1
Tanaman Pangan & Perkebunan	10,8	25,8	10,0	43,1	7,2	33,0
<b>SEKTOR SEKUNDER</b>	<b>62,3</b>	<b>64,2</b>	<b>73,8</b>	<b>48,7</b>	<b>76,6</b>	<b>57,0</b>
Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya	4,8	1,2	6,2	1,5	7,7	2,0
Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Ind. Barang Karet & Barang Plastik	6,5	2,9	3,3	2,3	2,8	2,3
Ind. Kayu	3,3	1,3	3,3	8,5	4,8	0,5
Ind. Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	0,4	6,5	3,0	2,6	1,2	9,4
Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	7,2	16,5	2,2	7,3	2,0	2,8
Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	3,6	1,6	3,8	0,1	12,5	0,7
Industri Lainnya	5,2	1,3	2,5	0,0	2,3	0,6
Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektronika	11,5	2,3	10,3	3,2	12,2	3,4
Ind. Makanan	8,4	19,3	6,2	16,1	9,3	31,7
Ind. Tekstil	9,9	8,8	32,5	5,8	21,2	2,8
Ind. Min. Non Logam/Non Metal Min. Ind.	1,4	2,5	0,7	1,2	0,5	0,7
<b>SEKTOR TERSIER</b>	<b>22,8</b>	<b>6,2</b>	<b>13,4</b>	<b>6,7</b>	<b>11,7</b>	<b>5,8</b>
Elektrik, Gas Dan Air	0,1	0,0	0,7	0,1	0,3	0,4
Hotel Dan Restoran	2,8	1,1	1,2	0,7	1,3	0,8
Jasa Lainnya	3,0	1,7	2,3	2,0	2,5	0,5
Konstruksi	2,4	0,5	1,4	1,0	0,9	2,8
Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	5,3	2,7	1,9	1,5	2,1	0,9
Perdagangan & Reparasi	9,2	0,1	5,2	1,3	4,6	0,4
<i>Real Estate, Kawasan Ind. &amp; Perkantoran</i>	0,1	0,1	0,7	0,2	0,2	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1000

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara rata-rata, tren realisasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2002–2008. Akan tetapi, jika diperhatikan tahun per tahun, nilai PMA dan PMDN tersebut cenderung berfluktuasi relatif tajam. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah PMA mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan PMDN terhadap

nilai investasi melalui jalur fasilitas. Distribusi investasi PMA dan PMDN menurut tingkat pertumbuhan, lokasi, porsi investasi, sektor usaha, dan serapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 10.** Ringkasan Peta PMA dan PMDN

Investasi	Lokasi Utama	Pertumb. Realisasi 2003-2008	Porsi Investasi (2002-2008)*	Sektor Usaha (2002-2008)	Serapan Tenaga Kerja (2005-2007)
<b>PMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jawa (DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jatim)</li> <li>▪ Sumatra (Riau, Sumsel, Sumut, Kepri)</li> </ul>	38,3%	72,4%	Bergeser dari sektor sekunder (50% th 2002) ke sektor tersier (70% th 2008)	Porsi Sektor Sekunder meningkat dari 62% (2005) menjadi 77% (2007) terhadap serapan tenaga kerja PMA (kecenderungan penurunan terjadi pada sektor primer dan tersier).
<b>PMDN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jawa (Jabar, Jatim, Banten, DKI, Jateng)</li> <li>▪ Sumatra (Riau, Sumsel, Lampung)</li> <li>▪ Kalimantan (Kalteng, Kalsel)</li> </ul>	17,9%	27,6%	Relatif stabil (porsi sektor sekunder sekitar 70%)	Porsi Sektor Sekunder menurun dari 64% (2005) menjadi 57% (2007) terhadap serapan tenaga kerja PMDN (sektor primer menguat dan tersier stabil).

\* Perhitungan yang dilakukan menggunakan asumsi kurs tengah yang berlaku secara rata-rata adalah sebesar Rp 9.000 per 1 US\$.

Dari aspek lokasi, sebagian besar PMA dan PMDN masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai, potensi pasar yang relatif lebih besar, dan pasokan tenaga kerja berkualitas lebih banyak di kedua pulau tersebut. Faktor-faktor ini sangat penting terutama bagi proyek investasi yang tidak terlalu tergantung pada ketersediaan bahan baku lokal (*footlose investment*).

Perkembangan PMA sedang memasuki babak baru setelah diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan dikeluarkannya beragam paket kebijakan perbaikan iklim investasi oleh pemerintah. Substansi UU dan paket kebijakan investasi tersebut telah menempatkan kesetaraan antara PMA dan PMDN, menyediakan beragam fasilitas serta memberikan berbagai kemudahan investasi sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing. Tidak heran, setelah itu perkembangan jumlah IUT dan investasi PMA mengalami peningkatan yang cukup fantastis. PMA, harus diakui telah memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam jangka panjang, seyogyanya pemerintah bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan peran PMA dan PMDN. Di masa mendatang, PMA dan PMDN harus di dorong untuk menjadi instrumen pembangunan yang diharapkan mampu memperbaiki tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia. Hal ini sangat mendesak dilakukan mengingat secara geografis, PMA dan PMDN masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal potensi sumber daya alam yang tersebar di luar Pulau Jawa begitu besar dan belum banyak dimanfaatkan. Memaksa investor untuk memilih lokasi di luar Pulau Jawa tentu tidak mungkin dilakukan, oleh karena itu pemerintahlah yang harus proaktif untuk mempercepat pembangunan kawasan luar Pulau Jawa sehingga bisa semenawan Pulau Jawa di mata para investor. Perhatian pemerintah bisa dimulai dengan melakukan pembangunan infrastruktur penunjang investasi secara intensif dan komprehensif di daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang mempunyai potensi untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Langkah lanjutan yang bisa ditempuh adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan insentif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa, khususnya mereka yang akan berinvestasi di sektor sekunder (manufaktur).

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2009. *Data Perkembangan Penanaman Modal 2009*. Jakarta: BKPM.
- [http://www.bkpm.go.id/file\\_uploaded/public/Ranking of Direct Investment Realization by Location, 2009.pdf](http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Ranking of Direct Investment Realization by Location, 2009.pdf).
- [http://www.bkpm.go.id/file\\_uploaded/public/Ranking of Direct Investment Realization by Sector, 2009.pdf](http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Ranking of Direct Investment Realization by Sector, 2009.pdf).
- [http://www.bkpm.go.id/file\\_uploaded/public/Foreign Direct Investment Realization by Location, 2006-2009.pdf](http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Foreign Direct Investment Realization by Location, 2006-2009.pdf).
- [http://www.bkpm.go.id/file\\_uploaded/public/Domestic Direct Investment Realization by Location, 2006-2009.pdf](http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Domestic Direct Investment Realization by Location, 2006-2009.pdf).
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Ritel dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Japan International Cooperation Agency (JICA).2007. *Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies*. JBIC Institute.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. "Menanti Revormasi Iklim Investasi dan Bisnis di Indonesia. Makalah dalam Diskusi Panel Ahli Kompas, Harian Kompas, Jakarta Pusat, 24 Januari 2005. (<http://www.mudrajad.com>)
- Negara, S. D., Carunia, M. F. & L, Adam. 2010. "The Development of Foreign Direct Investment and Its Impact on Firm's Productivity, Employment and Exports in Indonesia". Proceeding International Conference on Foreign Direct Investment in East Asia: Issue, Strategies, and Prospects, Bangkok, September 2009.
- Raharja, Sam'un Jaja. 2005. "Tantangan dan Peluang Investasi di Indonesia". Makalah pada Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM) IX, Bandung 10-12 Mei 2005, ([www.unpad.ac.id.pdf](http://www.unpad.ac.id.pdf)).
- Saleh, D.Z. 2007. "Peran Kenegarawanhan Kader Partai Demokrat di Daerah". *News Demokrat-Ekonomi Bisnis*, Edisi 14, April 2007.
- Sarwedi. 2002. "Investasi Asing di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 4 (1),2002. (<http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting>).
- Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- UNCTAD. 2007. *World Investment Report 2007*, New York & Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- World Economic Forum (WEF). *The Global Competitiveness Report 2004–2005 and 2005–2006*
- Yuliana, Chitra Indah. 2008. *Anatomi Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.